

SETELAH DIJADWALKAN

Warga Jangan Mangkir dari Vaksinasi

YOGYA (KR) - Warga masyarakat yang sudah mendapatkan jadwal untuk divaksin, hendaknya tidak mangkir. Alasannya, proses vaksinasi untuk dirinya sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Jika tidak datang, tidak hanya merugikan dirinya, karena kehilangan kesempatan divaksin segera, juga dapat merugikan orang lain dan juga negara.

Demikian dikemukakan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) DIY, dr Joko Murdiyanto kepada KR, Minggu (23/5) menanggapi sering ditundanya warga yang mangkir dari jadwal vaksinasi. "Kami harapkan, kalau sudah terjadwal, jangan tidak datang dengan alasan yang tidak jelas. Paling tidak dapat memberitahu, agar dilakukan antisipasi," ujar dr Joko.

Dijelaskan, pihak yang memberikan layanan vaksinasi, ketika akan melayani warga yang mendapat giliran divaksin, akan mempersiapkan lebih dulu dengan baik. Jangan sampai jumlah vaksin yang tersedia, kurang ataupun kelebihan.

Dari informasi yang diperoleh KR, jumlah dosis vaksin yang akan digunakan dihitung sedemikian rupa, disesuaikan kebutuhan penggunaan di saat itu. Ketika akan digunakan, maka vaksin harus dikeluarkan dari penyimpanan dengan suhu tertentu. Begitu dikeluarkan, maka vaksin akan keluar dari suhu penyimpanan, sehingga bakal terjadi perubahan suhu. Karena itu, vaksin tersebut sebisa mungkin harus digunakan dan tidak disimpan kembali.

Menurut Joko, pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar secara sadar tidak mangkir dari jadwal vaksinasi. Sehingga vaksin yang sudah disediakan, dapat terpakai. Jika masyarakat semakin sadar akan pentingnya vaksinasi, maka diharapkan Indonesia akan semakin meningkat kekebalan komunalnya.

Diingatkan pula, meski sudah mengikuti vaksinasi, baik dosis pertama dan kedua, warga diharapkan tetap menegakkan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Jika masyarakat semakin sadar, maka kesadaran kolektif bisa memudahkan dalam proses pemulihan di masa pandemi. **(Jon)-f**

SENTRA PENGOLAHAN BERAS TERPADU

Kolaborasi Upaya Mewirauasakan Petani



KR-Istimewa

Menteri BUMN dan rombongan saat mengunjungi SPBT Kebumen.

KEBUMEN (KR) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Teten Masduki, dan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi didampingi Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Rohan Hafas serta Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengadakan kunjungan kerja ke Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) di Kebumen, Jawa Tengah, Minggu (23/5).

Erick Thohir memuji kolaborasi antara Bank Mandiri dan Pertamina dalam pembentukan SPBT ini. Penggilingan beras ini tak hanya akan meningkatkan produktivitas petani untuk menghasilkan beras premium demi mewujudkan

ketahanan pangan, namun karena dikelola berdasarkan model perusahaan dengan pendampingan dan pengawasan oleh Bank Mandiri, SPBT ini menjadi tahapan dalam program mewirauasakan petani.

"Ini untuk mendukung petani terutama pada masa panen dan pascapanen, demi menciptakan skala usaha yang lebih besar dan mampu bersaing di pasar," katanya.

Darmawan Junaidi menyampaikan, Bank Mandiri berkomitmen mendukung program Pemerintah untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk itu, pihaknya kembali merealisasikan Program Mewirauasakan Petani dan memberikan pendampingan kepada petani padi di Kebumen.

Dalam Program Kewirausahaan Petani ini, telah

dibentuk PT Mitra Desa Kebumen (PT MDK) yang akan mengimplementasikan program dengan empat tahap mewirauasakan petani, yakni pratanam, tanam, panen dan pascapanen. PT MDK merupakan perusahaan yang kepemilikan sahamnya merupakan petani dari 19 Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Kutowinangun yang diwakili Koperasi Migatani Lestari Mandiri dan PT Mitra BUMDes Nusantara yang merupakan anak perusahaan BUMN, dikelola secara profesional untuk kesejahteraan petani.

Tujuan program ini agar petani mendapatkan kemudahan akses permodalan, pengetahuan budidaya tanam terbaik, pengolahan beras sehingga menghasilkan produksi beras premium dan bernilai jual tinggi, yang dapat dipasarkan secara luas baik online maupun offline.

Menurut Rohan Hafas, skema Program Mewirauasakan Petani di Kebumen ini mereduplikasi program serupa yang telah dilakukan di Pamarican, Jawa Barat dan diharapkan dapat mengikuti keberhasilan proyek tersebut. Diinisiasi sejak 2017, Program Pamarican kini telah beroperasi secara mandiri sehingga mampu memberikan nilai tambah secara berkesinambungan. **(San)-f**

Tinggalkan

Sambungan hal 1

"Selamat jalan kakakku, mentor di jagad jurnalistik, Mas Wismoko Poemomo/KR," ungkap Butet.

Mas WPoer bagi KR, selama masih bertugas, tidak hanya sebagai wartawan yang suka bekerja keras, tetapi juga punya kepedulian dalam pengkaderan wartawan muda. Dengan sabar, ia mengemban wartawan muda untuk dijadikan andal ke depannya.

Bagi Pemimpin Redaksi SKH KR, Octo Lampiton, Mas WPoer adalah sosok jurnalis yang sering jadi tempat diskusi. Baik membahas masalah musik, seni budaya atau sosial. Kalau menulis bahasanya cair, santai dan mengalir. Karena itulah, W Poer diminta menjadi pembimbing para reporter baru KR sebelum terjun ke lapangan.

"Kami menyebutnya sebagai Pak Lurah" katanya. Jika 'Pak Lurah' sudah setuju, maka reporter boleh terjun ke lapangan.

Demikian juga musisi Bram Mכהekum, dedengkotnya Kelompok Musik Kampung yang pernah bergaung dengan Bengkel Teater WS Rendra, menganggap WPoer adalah jurnalis yang sering membantu para seniman.

"Banyak caranya, ketika para seniman sambat kepadanya" kata Bram yang mengatakan sangat kehilangan sahabat yang fasih kalau menyanyi lagu-lagunya Rolling Stone dan The Beatles.

Demikian pula dengan Mas Sugeng. Selain dengan banyak kalangan, juga aktif dalam pengembangan

even kebudayaan, seperti batumulia dan keris.

Dalam berbagai diskusi kebudayaan, Mas Sugeng kerap memberikan masukan, usulan untuk memperkuat pandangan kebudayaan. Almarhum juga sering menulis tema-tema kebudayaan. Sering ia dipanggil sebagai Ki Bangunjiwo, dalam menyampaikan opininya terkait kebudayaan dan pembangunan karakter.

Dalam organisasi kewartawanan, mas Sugeng aktif dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY. Demikian juga aktif dalam kegiatan paguyuban wartawan sepuh.

Meski telah pergi, kedua wartawan senior meninggalkan jejak yang berarti bagi generasi penerusnya. **(Jon)-f**

Kemenpan

Sambungan hal 1

Menurut Tjahjo, penegak hukum masih kesulitan menjatuhkan sanksi pidana yang tegas terhadap oknum pelaku peretasan dan pembocoran data.

Sejauh ini, payung hukum terkait perlindungan data pribadi masih merujuk pada Undang-Undang (UU) No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 26 ayat (1). Namun, UU itu belum memberi sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi warga.

Pasal itu mengatur penggunaan tiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus mendapat persetujuan dari pemilik data. Ketentuan itu kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.20/2016 tentang

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Pasal 36 peraturan menteri itu menegaskan, pihak yang menyebarkan data pribadi dapat kena sanksi berupa peringatan lisan, tertulis, penghentian kegiatan atau pengumuman di situs online.

Terkait dugaan adanya kebocoran data 279 juta pengguna layanan BPJS Kesehatan, Tjahjo mendukung langkah Kemenkominfo mengusut tuntas kejadian tersebut. "Kami mendukung Kemkominfo untuk mengusut tuntas kejadian kebocoran data WNI (warga negara Indonesia) ini. Saya yakin data-data yang dimiliki ASN juga termasuk di dalamnya," kata Tjahjo.

Kebocoran itu jadi perhatian Tjahjo karena hampir seluruh pegawai ASN, pra-

jurit TNI dan anggota Polri terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kemenkominfo melalui juru bicaranya, Dedi Permadi, Jumat (21/5) mengatakan, hasil pemeriksaan awal menunjukkan data yang bocor itu diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada data Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan.

Walaupun demikian, pemeriksaan terhadap data bocor itu masih berlangsung dan BPJS Kesehatan telah membentuk tim investigasi gabungan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kemenkominfo dan Telkom untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. **(Ati/Ant)-f**

Kebocoran

Sambungan hal 1

Sayangnya, dalam dunia digital, hal yang tidak diharapkan seperti peretasan akun, penipuan daring, dan beragam aktivitas kriminal daring yang lain adalah masalah menunggu waktu. Robert Mueller, mantan Direktur FBI, mengatakan bahwa hanya ada dua jenis perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan yang sudah diretas, dan yang kedua adalah yang belum dan menunggu untuk diretas.

Pada akhirnya, perusahaan yang telah melakukan mitigasi dengan baiklah yang dapat menjaga keamanan data yang mereka miliki. Upaya mitigasi kebocoran data perlu dijadikan sebagai prioritas yang harus dijalani institusi yang menyimpan ribuan atau bahkan jutaan data pengguna. Dalam pengamanan data, setidaknya ada tiga parameter yang harus diikuti. Pertama adalah menentukan mana saja data yang dikelola yang merupakan data sensitif. Kemudian diikuti dengan klasifikasi data yang dimiliki, dan yang terakhir adalah menentukan kebijakan atau aturan tentang siapa atau apa yang berhak mengakses data tersebut. Yang menjadi masalah, tidak setiap organisasi

melakukan klasifikasi dan pengamanan ini dengan baik. Tidak sedikit institusi yang berlingkup dengan kalimat 'tidak ada password yang bocor karena password dienkripsi sedemikian rupa ...', ketika kebocoran data terjadi. Padahal, data personal lain yang sensitif dan tidak terproteksi dapat dipergunakan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membobol akun kita di sistem lain. Karena, tidak sedikit pengguna yang menggunakan ulang kredensial yang sama di berbagai sistem.

Selain kebocoran pada sistem, banyak aktivitas yang dianggap sebagai hal biasa yang sebenarnya dapat membahayakan diri kita dalam dunia digital. Kebiasaan seperti memfotokopi eKTP dan Kartu Keluarga dan diberikan kepada pihak ketiga yang tidak jelas pertanggungjawabannya menjadikan data penting ini rawan disalahgunakan. Masyarakat pun biasa berbagi data pribadi lain dengan sukarela seperti tanggal kelahiran, alamat rumah, dan beragam informasi pribadi lain. Padahal data penting ini sering dipergunakan sebagai salah satu fitur pengamanan pada berbagai sistem di banyak institusi

atau perusahaan. Ketika kunci-kunci yang sedianya menjadi fitur pengamanan sistem sudah terbuka di ruang publik, keamanan seperti apa yang dapat diharapkan? Budaya lama mestinya turut berubah dengan hadirnya teknologi. Misal, fotocopy e-KTP dilarang namun diganti menjadi foto e-KTP yang dikirim melalui WhatsApp. Hal ini tetap memungkinkan terjadi penyalahgunaan data. Selain mengubah budaya, kepastian hukum akan menjadikan institusi yang menyimpan data menjadi lebih memperhatikan dan menjadikan pengamanan data sebagai bagian integral dari pengembangan sistem.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang hingga kini masih dalam pembahasan di DPR dan pemerintah menjadi sangat mendasak untuk segera disahkan. Hal ini agar memunculkan kepastian mengenai tata kelola perlindungan data dan meminimalisir permasalahan yang muncul baik pada sektor publik maupun privat.

(Penulis adalah Kepala Badan Sistem Informasi, Universitas Islam Indonesia)-f

GeNose

Sambungan hal 1

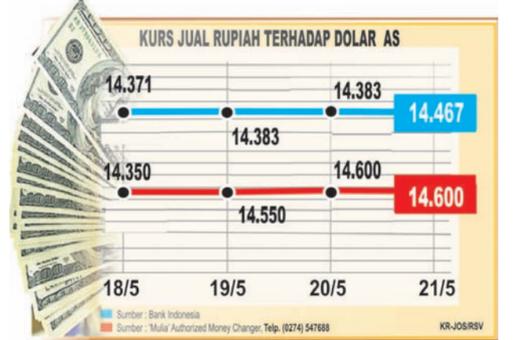
Dian juga menjelaskan bahwa pembaruan kecerdasan buatan GeNose C19 akan berjalan dinamis. Artinya, perangkat AI akan rutin diperbarui dan hal itu membutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk memastikan prosedur pengambilan sampel dilakukan dengan tepat.

Prof Kuwat menerangkan, selain memperbaiki kecerdasan buatan, tim peneliti juga sudah mengembangkan sistem penjaminan mutu yang disebut kalibrasi. Kalibrasi ini berguna untuk menyeringkan atau membuat sistem konsisten, antara

mesin satu dan lainnya la juga menuturkan bahwa evaluasi pengoperasian mesin di lapangan juga sedang dilakukan secara acak oleh tim peneliti. Hasil dari temuan di lapangan tersebut akan dipakai sebagai umpan balik dalam menyempurnakan GeNose C19.

Sebagai alat kesehatan, GeNose C19 juga sedang berada dalam tahap uji di-

agnostik post-marketing, yaitu uji validitas eksternal. Tujuannya untuk mengonfirmasi performance alat itu apabila diimplementasikan di kondisi real dengan berbagai macam perilaku operator dan kondisi. Uji validitas eksternal GeNose C19 akan dilakukan oleh tiga institusi, yakni Universitas Andalas, Universitas Indonesia, dan Universitas Airlangga. **(Dev)-f**



Bareskrim

Sambungan hal 1

Akun bernama Kotz memberikan akses download (unduh) secara gratis untuk file sebesar 240 megabyte (Mb) yang berisi 1.000.002 data pribadi masyarakat Indonesia.

File tersebut dibagikan sejak 12 Mei 2021. Bahkan, dalam sepekan ini ramai menjadi perhatian publik. Akun tersebut mengklaim mempunyai lebih dari 270 juta data lainnya yang dijual seharga 6.000 dolar Amerika Serikat. **(Ant)-f**

Prakiraan Cuaca				Senin, 24 Mei 2021		
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					23-32	60-95
Sieman					23-31	65-95
Wates					23-32	60-95
Wonosari					23-32	60-95
Yogyakarta					23-32	60-95

☀️ Cerah ☁️ Berawan 🌫️ Udara Kabur 🌧️ Hujan Lokal 🌧️ Hujan Pelir

Melindungi Data Pribadi, Dimulai dari Diri Sendiri



Riski Damastuti, S.Sos., M.A.
Universitas Amikom Yogyakarta

MENINGKATKANNYA penggunaan internet membuat cyber space menjadi lingkungan interaksi sosial baru bagi publik. Cyber space dapat diartikan sebagai dunia maya atau virtual world. Istilah Cyber space bukanlah hal baru. Cyber space mulai diperkenalkan pada tahun 1980an, salah satunya oleh William Gibson dalam bukunya *Neuromancer*. Definisi dan kajian akan istilah cyber space kemudian makin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan pegerasan penggunaan komputer dalam masyarakat.

Beberapa istilah yang terdapat pada kajian dunia siber seakan mengkonversi elemen – elemen dalam sistem sosial,

seperti istilah Cyber Culture yang muncul dalam beberapa buku Sherry Turkle, serta istilah Cyber Society yang diperkenalkan dalam buku Marshall McLuhan berjudul *The Global Village*. Dunia siber juga turut mengembangkan ranah kajian penelitian dengan munculnya metode netnografi yang merupakan adaptasi etnografi terhadap interaksi yang ada pada dunia siber. Konversi elemen – elemen sistem sosial tersebut sejatinya menjadi salah satu indikator bahwa dunia siber menjadi salah satu bagian dalam kehidupan sosial yang perlu untuk diperhatikan.

Perkembangan interaksi di dunia siber dan bertambahnya jumlah pengguna internet idealnya diikuti dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan literasi digital dan perhatian masyarakat akan cyber security. Berdasarkan survei yang dilakukan KOMINFO, pengguna internet Indonesia pada tahun 2020 meningkat sebanyak 25,5 juta pengguna. Pertumbuhan jumlah

pengguna internet menyebabkan urgensi akan literasi digital dan cyber security semakin perlu untuk diperhatikan. Hal inipun diperkuat dengan temuan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), bahwa serangan siber meningkat sebanyak empat kali lipat selamapandemi.

Keamanan (security) yang tadinya hanya dimaknai sebagai keamanan dunia nyata harus mulai diintegrasikan dengan keamanan dunia siber (cyber security). Cyber security berkorelasi dengan perlindungan data pribadi (personal data protection). Jika meruntut kilas balik, masih teringat jelas beberapa isu cyber security berupa kasus kebocoran data warga Indonesia yang diungkapkan pada tahun 2020. Pada bulan Mei 2020, terdapat informasi 3 kasus kebocoran data yang cukup menghebohkan masyarakat yaitu kebocoran lebih dari 91 juta data pengguna maupun merchant Tokopedia yang diperjual belikan di situs gelap (dark web), jual beli data 1,2 juta pengguna situs Bhinneka.com,

serta kebocoran Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2014 pada forum komunitas perentas. Pada bulan Agustus 2020 terjadi kebocoran data pengguna Kredit Plus, berupa sejumlah data pribadi seperti nama, alamat email, kata sandi, alamat rumah, nomor telepon, data pekerjaan, serta data Kartu Keluarga. Kasus kebocoran dan jual beli data pribadi tersebut makin bertambah, hingga sekitar satu minggu lalu tersebar informasi bahwa data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan data tersebut diisukan sebagai data pengguna BPJS Kesehatan.

Apa yang terjadi jika data saya bocor?

Jika diingat, beberapa tahun lalu marak terjadi penipuan via sms ataupun telepon, mulai dari meminta diisikan pulsa, membayar tagihan pinjaman, maupun hipnotis melalui telepon. Penipuan tersebut dilakukan hanya berbekal nomor telepon. Namun, dengan kebocoran data digital yang lebih kompleks dan sensitif, sangat memungkinkan upaya ancaman yang lebih

berbahaya. Kebocoran data pribadi memungkinkan pelaku mengetahui dan mengganti kata sandi akun email maupun media sosial, sehingga pengguna asli kesulitan bahkan tidak dapat mengakses kembali akun tersebut. Peretasan akun email oleh pelaku tentunya memunculkan berbagai ancaman, mengingat hampir seluruh aktivitas digital di dunia siber mensyaratkan alamat email. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari upaya peretasan tersebut adalah mengaktifkan sistem pengamanan Two Factor Authentication (TFA) dengan menggunakan One Time Password (OTP) melalui SMS. Selain itu, penggunaan variasi huruf, angka, simbol sebagai kata sandi dan penggantian secara berkala juga dapat mencegah peretasan.

Ancaman lain yang dapat terjadi dari kebocoran data pribadi adalah penggunaan data tersebut sebagai profiling target politik, serta iklan media sosial sehingga pihak yang memiliki data dapat menargetkan

pesan tertentu pada sekelompok orang tertentu demi kepentingan politik pihak pemilik data. Namun, ancaman kebocoran data pribadi yang langsung dirasakan oleh korban adalah penggunaan data tersebut untuk merentas layanan keuangan digital serta mengakses pinjaman online. Hal ini tentunya cukup meresahkan, mengingat layanan keuangan digital semakin jamaik digunakan beberapa waktu terakhir ini. Berbagai ancaman yang mungkin dapat terjadi dari kebocoran data pribadi seharusnya membuat netizen makin bijak menggunakan data pribadinya di dunia siber. Belum adanya tindak lanjut pemerintah terhadap pembahasan Rancangan Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) memaksa netizen untuk melindungi data pribadi dimulai dari diri sendiri. Yuk kita mulai lindungi data pribadi dan tingkatkan literasi digital untuk kehidupan siber yang lebih baik! (*)